



The transition dilemma: The practice of integrating the Kurikulum 2013 and Kurikulum Merdeka

Tengku Fajar Rahmadani Adha Syahputra

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

tengkufajar@upi.edu

ABSTRACT

Changes to the national curriculum in Indonesia often present unique challenges for educational institutions, particularly during the transition from the Kurikulum 2013 to the Kurikulum Merdeka. The main issues that arise are unprepared human resources, limited facilities, and unequal understanding of the new curriculum. This study aims to provide an overview of schools' approaches to designing and implementing the established curriculum. The study was conducted at SMA Kartika XIX-2, Bandung City, using a descriptive qualitative approach through in-depth interviews with the vice principal in charge of the curriculum. The results indicate that grades 10 and 11 have implemented the Kurikulum Merdeka, while grade 12 still uses the Kurikulum 2013 due to internal school limitations. Obstacles faced include limited teacher training, limited expertise, and constraints on facilities and funding. Evaluation of the Kurikulum Merdeka remains limited because there are no graduates at that level who can provide a comprehensive overview. These findings emphasize the importance of a flexible transition approach and contextual policy support to ensure that curriculum implementation is not only formal but also substantive and sustainable.

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 24 Feb 2026

Revised: 14 Jul 2026

Accepted: 21 Jul 2026

Publish online: 27 Aug 2026

Keywords:

curriculum transition; educational policy; Kurikulum 2013; Kurikulum Merdeka

Open access

Hipkin Journal of Educational Research is a peer-reviewed open-access journal.

ABSTRAK

Perubahan kurikulum nasional di Indonesia sering kali menghadirkan tantangan tersendiri bagi satuan pendidikan, terutama selama masa transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. Masalah utama yang muncul adalah ketidaksiapan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas, dan belum meratanya pemahaman terhadap kurikulum baru. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sekolah dalam merancang dan menerapkan kurikulum yang ditetapkan. Studi dilakukan di SMA Kartika XIX-2 Kota Bandung dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Hasilnya menunjukkan bahwa kelas X dan XI telah menerapkan Kurikulum Merdeka, sementara kelas XII masih menggunakan Kurikulum 2013 sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan internal sekolah. Hambatan yang dihadapi mencakup minimnya pelatihan bagi guru, keterbatasan tenaga ahli, serta kendala terkait fasilitas dan dana. Evaluasi Kurikulum Merdeka masih terbatas karena belum ada lulusan dari jenjang tersebut yang dapat memberikan gambaran yang menyeluruh. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan transisi yang fleksibel dan dukungan kebijakan yang kontekstual agar implementasi kurikulum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan; Kurikulum 2013; Kurikulum Merdeka; transisi kurikulum

How to cite (APA 7)

Syahputra, T. F. R. A. (2026). The transition dilemma: The practice of integrating the Kurikulum 2013 and Kurikulum Merdeka, 3(2), 375-386.

Peer review

This article has been peer-reviewed through the journal's standard double-blind peer review, where both the reviewers and authors are anonymised during review.

Copyright



2026, Tengku Fajar Rahmadani Adha Syahputra. This an open-access is article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author, and source are credited. *Corresponding author: tengkufajar@upi.edu

INTRODUCTION

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi murid (Sucipto *et al.*, 2024). Kurikulum berfungsi bukan sekadar dokumen statis, melainkan kerangka dinamis yang menjembatani visi pendidikan nasional dengan praktik pembelajaran di kelas. Kurikulum harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap elemen, baik tujuan instruksional, materi ajar, metode pembelajaran, maupun sistem evaluasi, saling terintegrasi untuk mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan (Matondang *et al.*, 2025). Selain itu, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari guru, kepala sekolah, wali murid, pemerintah lokal, hingga dunia usaha menjadi fondasi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kurikulum (Syahroni *et al.*, 2025).

Keselarasan antara visi makro pendidikan dan praktik lapangan memungkinkan proses pembelajaran berjalan terstruktur dan konsisten, sehingga murid tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata. Melalui kerangka kerja yang fleksibel, kurikulum dapat beradaptasi terhadap perubahan kebijakan atau kebutuhan lokal tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran bagi murid. Di era Revolusi Industri 4.0, tuntutan global terhadap kompetensi abad ke-21 semakin tinggi, meliputi kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital (Bahja *et al.*, 2025). Sekolah tidak hanya dituntut untuk memberikan materi akademik, tetapi juga untuk merancang pengalaman belajar yang kontekstual dan autentik, misalnya melalui *problem-based learning*, *active learning*, dan *cooperative learning*.

Model-model tersebut mendorong murid untuk terlibat secara aktif dalam situasi nyata, mulai dari perumusan masalah, penyelidikan data, hingga presentasi solusi, sehingga mereka terlatih memecahkan persoalan kompleks di berbagai bidang. Literasi digital tidak lagi sekadar mengoperasikan perangkat keras atau perangkat lunak, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menilai, mengolah, dan menyajikan informasi secara kritis di era digital (Bahja *et al.*, 2025). Pemerintah melakukan pembaruan kurikulum melalui penerapan Kurikulum Merdeka sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu murid menghadapi berbagai tantangan pendidikan, termasuk perubahan pola belajar di era digital serta pembelajaran jarak jauh (Tampubolon *et al.*, 2022). Tanpa pembaruan kurikulum yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, ada risiko besar bahwa kompetensi lulusan sekolah kehilangan relevansi di pasar global, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan daya saing nasional.

Sejak diberlakukannya Kurikulum 2013, banyak satuan pendidikan mengalami kendala serius dalam pelaksanaannya, terutama terkait kesiapan guru, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pemahaman yang belum merata terhadap struktur Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Meskipun Kerangka Kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi intelektual, sikap, dan keterampilan secara sistematis, realitas di lapangan sering kali menunjukkan ketimpangan antara dokumen kebijakan dan praktik pembelajaran sehari-hari. Guru sebagai ujung tombak implementasi terkadang menghadapi kekurangan pelatihan resmi maupun sumber belajar yang relevan. Selain itu, infrastruktur, seperti laboratorium, perpustakaan, atau perangkat teknologi digital, belum merata ketersediaannya di berbagai daerah. Akibatnya, beberapa sekolah harus menyesuaikan kurikulum secara mandiri tanpa dukungan teknis yang memadai, sehingga menghambat konsistensi dan kualitas pendidikan yang dihasilkan (Muzaky & Achadi, 2024; Salsabilah *et al.*, 2024).

Dalam menjawab tantangan tersebut, pada 2021 Kemendikbudristek memperkenalkan Kurikulum Merdeka yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam merancang program pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kontekstual, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila (Matondang *et al.*, 2025). Kurikulum Merdeka dirancang agar lebih fleksibel dan adaptif, tetapi transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka menimbulkan dilema tersendiri bagi banyak sekolah, antara lain minimnya

pelatihan bagi guru, keterbatasan tenaga ahli, serta kendala terkait fasilitas dan pendanaan (Damayanti *et al.*, 2023). Sebagai respons atas kebijakan transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka, penelitian terdahulu telah memetakan tantangan dan strategi implementasi di beberapa SMA melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan wawancara mendalam dengan tim kurikulum, yang menekankan pentingnya perencanaan kolaboratif antar-pemangku kepentingan (Kurniawan *et al.*, 2024). Di sisi lain, perubahan kebijakan ini dikaji secara makro melalui analisis kebijakan, studi dokumen dan *focus group discussion* yang menyoroti dinamika pembaruan regulasi, kesiapan sekolah dalam menyusun dokumen kurikulum baru, serta perlunya pendalaman analisis dampak di lapangan (Puspita & Atikah, 2023).

Secara lebih spesifik, hambatan guru, termasuk keterbatasan sosialisasi dan sumber belajar, mengungkap adanya kesenjangan signifikan antara pelatihan formal dan praktik di kelas sebagai faktor utama kegagalan dalam mengadopsi Kurikulum Merdeka (Widiansyah *et al.*, 2025). Sejalan dengan itu, model asesmen bahasa dalam Kurikulum Merdeka dievaluasi melalui eksperimen lapangan dan kuesioner yang menunjukkan efektivitas format penilaian baru sekaligus mengungkap kebutuhan akan pelatihan khusus bagi guru (Darwin *et al.*, 2023). Kombinasi berbagai pendekatan metodologis ini memang memperkaya pemahaman tentang dimensi implementasi kurikulum. Walaupun kelima studi tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam hal strategi kebijakan, analisis regulasi, tantangan yang dihadapi guru, perubahan dalam mata pelajaran tertentu, serta pengembangan model asesmen, masih terdapat ruang yang belum tersentuh dalam kajian penelitian.

Pertama, belum ada studi yang memetakan praktik *penerapan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka secara bersamaan* di satuan SMA umum. Kedua, penelitian terdahulu cenderung terpisah menurut mata pelajaran atau fokus kebijakan, tanpa mempertimbangkan koordinasi antar kurikulum dalam satu institusi. Ketiga, aspek evaluasi jangka panjang pasca-transisi belum banyak diteliti. Oleh karena itu, studi ini akan menutup *gap* tersebut dengan menganalisis bagaimana SMA Kartika XIX-2 merancang, menerapkan, dan mengevaluasi *hybrid curriculum model* secara kontekstual dan berkelanjutan. SMA Kartika XIX-2 Kota Bandung, sebagai salah satu sekolah menengah di wilayah Jawa Barat, mengadopsi pendekatan *hybrid curriculum model* dengan menerapkan Kurikulum Merdeka pada kelas X dan XI, sementara kelas XII tetap menggunakan Kurikulum 2013 sebagai bentuk mitigasi terhadap keterbatasan internal (Damayanti *et al.*, 2023).

Keputusan tersebut diambil setelah melalui serangkaian diskusi di tingkat komite sekolah yang melibatkan pimpinan, guru, dan komite terkait. Sekolah mempertimbangkan sejumlah faktor: 1) Kesiapan sumber daya manusia yang belum merata; 2) Kondisi fasilitas pembelajaran yang masih terbatas; serta 2) Kebutuhan untuk menjaga kualitas evaluasi akhir murid kelas XII. Melalui model *hybrid curriculum model*, sekolah dapat memanfaatkan kelebihan Kurikulum Merdeka berupa otonomi dan proyek berbasis konteks untuk murid baru, sambil memastikan lulusan kelas XII mematuhi standar kelulusan yang telah ditetapkan dalam Kurikulum 2013. Pendekatan ini memerlukan koordinasi intensif antar pemangku kepentingan serta penyesuaian administrasi agar kedua kurikulum dapat berjalan secara sinkron tanpa menimbulkan beban berlebih bagi guru dan murid.

Berdasarkan konteks di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana praktik perpaduan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka dilaksanakan di SMA Kartika XIX-2 Kota Bandung. Secara khusus, studi ini akan mengkaji 1) Pertimbangan sekolah dalam memilih *hybrid curriculum model* yang adaptif dan sesuai dengan kondisi; 2) hambatan yang dihadapi terkait sumber daya manusia, pelatihan guru, serta sarana dan prasarana; dan 3) strategi evaluasi serta rekomendasi kebijakan kontekstual yang dapat mendukung transisi yang substantif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kerangka kerja transisi kurikulum di sekolah menengah lainnya, serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang program pendampingan dan pelatihan yang lebih efektif. Melalui pemahaman mendalam tentang praktik

hybrid curriculum model ini, diharapkan model kurikulum yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta kesiapan murid dalam menghadapi tantangan global.

LITERATURE REVIEW

Kurikulum dalam Pendidikan

Kurikulum merupakan inti dari sistem pendidikan yang menentukan arah, tujuan, dan isi pembelajaran yang diterima oleh murid. Kurikulum bisa dipandang secara sempit sebagai cetak biru atau dokumen formal tertulis, tetapi juga dapat dipandang sebagai program terencana yang mewujudkan dalam seluruh pengalaman belajar nyata murid di sekolah. Pandangan ini menegaskan bahwa kurikulum bersifat dinamis, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta tantangan global. Dalam konteks pendidikan modern, kurikulum harus mencerminkan kompetensi abad ke-21, seperti keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas (Wulandari, 2021). Kompetensi tersebut tidak hanya berkaitan dengan isi pembelajaran, tetapi juga dengan bagaimana murid mengalami proses belajar secara aktif dan bermakna. Hal ini sejalan dengan pendekatan konstruktivisme dalam pendidikan yang dikembangkan oleh Piaget, Vygotsky, dan Bruner, yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh murid melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman sosial (Chand, 2024).

Pendekatan konstruktivis menjadi landasan filosofis dalam desain Kurikulum Merdeka karena mendorong pembelajaran berbasis proyek, eksplorasi, dan penemuan mandiri, bukan sekadar transmisi informasi satu arah dari guru ke murid. Selain itu, prinsip pembelajaran terdiferensiasi yang menjadi ciri khas Kurikulum Merdeka berakar pada teori zona perkembangan proksimal (ZPD) Vygotsky, yang mendorong peran guru sebagai fasilitator dalam mengembangkan potensi individu murid (Wibowo *et al.*, 2025). Pengembangan kurikulum memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pengembangan sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan nyata. Kurikulum tidak hanya menjadi pedoman administratif bagi guru, tetapi juga menjadi alat strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang relevan, menantang, dan kontekstual. Dalam kerangka itu, kurikulum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dunia pendidikan dengan tuntutan dunia kerja dan kehidupan masyarakat secara lebih luas.

Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Perkembangan kurikulum di Indonesia telah melalui beberapa fase transformasi sejak masa kemerdekaan, dengan tujuan utama untuk menyesuaikan mutu pendidikan nasional pada setiap periode sejarah. Evolusi ini dimulai dari Kurikulum 1947 yang menitikberatkan pada pendidikan karakter dan nasionalisme, hingga Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada 2004 yang berfokus pada pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pengenalan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 merupakan langkah strategis untuk memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam merancang silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai konteks lokal. Dengan begitu, KTSP memungkinkan adaptasi yang lebih cermat terhadap karakteristik daerah dan kebutuhan murid, sekaligus membuka ruang inovasi dalam metode pengajaran dan penilaian (Paramita *et al.*, 2025).

Peralihan dari KTSP ke Kurikulum 2013 pada tahun 2013 menandai pergeseran paradigma dari otonomi penuh ke pendekatan yang lebih terstruktur dan terstandarisasi. Kurikulum 2013 menekankan pendekatan saintifik yang berbasis kompetensi dan karakter, tetapi menghadapi tantangan signifikan terkait kesiapan guru dan ketersediaan sarana prasarana (Fadhilah *et al.*, 2025; Laia *et al.*, 2025). Namun demikian, sejumlah kritik diarahkan terhadap desain sentralistik Kurikulum 2013 yang dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Temuan tersebut diperkuat oleh pernyataan bahwa dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, fleksibilitas dalam kurikulum menjadi kebutuhan mendesak agar kebijakan tidak bersifat seragam secara kaku, melainkan adaptif terhadap realitas di lapangan (Puad & Ashton, 2023). Guru mengalami kendala dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam Kurikulum 2013, yang berpotensi memengaruhi motivasi dan hasil belajar murid (Muhammad et al., 2023). Sejalan dengan kebutuhan tersebut, pada tahun 2021 Kemendikbudristek memperkenalkan Kurikulum Merdeka sebagai upaya untuk meningkatkan fleksibilitas melalui pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi, serta penguatan karakter. Kebijakan ini merupakan bentuk adaptasi pendidikan Indonesia terhadap tantangan global dan disrupsi digital yang menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan partisipatif (Saa, 2024).

Di sisi lain, evolusi kurikulum nasional selalu berada dalam ketegangan antara idealisme pendidikan dan tuntutan pragmatis kebijakan, sehingga proses reformasi sering kali diwarnai tarik-ulur antara visi jangka panjang dan kebutuhan jangka pendek. Akhirnya, pemahaman tentang sejarah dan dinamika perubahan kurikulum di Indonesia perlu disandingkan dengan tinjauan filosofis dan sosiokultural. Hal itu ditegaskan dalam sebuah penelitian yang menyatakan bahwa setiap kurikulum yang lahir mencerminkan nilai-nilai ideologis tertentu yang berkembang pada masanya, baik dalam hal orientasi nasionalisme, globalisasi, maupun tuntutan ekonomi-politik (Oktavia et al., 2023). Oleh karena itu, perubahan kurikulum tidak bisa dipahami hanya sebagai perubahan teknis, melainkan sebagai cerminan arah besar pendidikan bangsa.

Implementasi Kurikulum Merdeka

Dinamika perubahan kebijakan Kurikulum Merdeka disoroti sebagai aspek krusial yang memengaruhi proses implementasinya di tingkat sekolah. Melalui penggunaan metode studi dokumen dan *focus group discussion*, ditemukan bahwa revisi kebijakan yang terjadi berulang kali tanpa sosialisasi yang memadai sering menimbulkan kebingungan di antara pengelola sekolah. Banyak kepala sekolah dan guru yang belum menerima pedoman rinci tentang format RPP Merdeka, standar capaian pembelajaran, dan mekanisme asesmen baru, sehingga direkomendasikan dibuatnya *roadmap* transisi kebijakan yang terstruktur dan terjadwal, serta peningkatan kapasitas pusat dalam memberikan bimbingan teknis kepada sekolah (Puspita & Atikah, 2023). Masalah ini tercermin dalam kajian lain yang menyoroti tantangan kebijakan pendidikan nasional dalam menyesuaikan diri dengan tekanan global serta perkembangan teknologi digital yang pesat (Saa, 2024). Peralihan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka memerlukan kesiapan sekolah, guru, murid, serta dukungan sarana dan prasarana agar implementasinya dapat berjalan secara optimal (Salsabilah et al., 2024).

Penelitian mengenai kendala guru dalam mengadopsi Kurikulum Merdeka dilakukan melalui survei yang melibatkan 150 guru dari beberapa SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden merasa kurang siap akibat minimnya pelatihan formal dan keterbatasan sumber belajar yang tersedia. Guru-guru melaporkan adanya peningkatan beban administratif, terutama dalam penyusunan RPP berbasis proyek serta penilaian capaian pembelajaran autentik. Sebagian besar pelatihan yang diikuti masih bersifat teoretis dan berlangsung singkat, sehingga guru mengalami kesulitan menerapkan materi tersebut dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya program pelatihan berkelanjutan yang mengombinasikan teori dan pendampingan di lapangan (Widiansyah et al., 2025). Penguatan otonomi guru dan pemberian ruang inovasi sangat menentukan keberhasilan implementasi kurikulum baru, sehingga pelatihan tidak hanya bersifat instruksional, tetapi juga partisipatif dan reflektif (Yildiz et al., 2021).

Penelitian serupa menekankan pentingnya pembelajaran kontekstual dan berbasis karakter abad ke-21 untuk meningkatkan relevansi pembelajaran lintas mata pelajaran (Wulandari, 2021). Penelitian mengenai model asesmen bahasa dalam Kurikulum Merdeka dilakukan melalui eksperimen lapangan dan kuesioner

untuk mengevaluasi efektivitas penilaian autentik, seperti portofolio dan proyek nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru membutuhkan pelatihan khusus dalam merancang rubrik asesmen serta melaksanakan penilaian formatif secara berkelanjutan. Selain itu, murid menyatakan bahwa umpan balik konstruktif dari guru sangat membantu meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Oleh karena itu, direkomendasikan penyusunan modul pelatihan asesmen yang dapat diakses secara daring oleh guru di berbagai jenjang pendidikan (Darwin *et al.*, 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menyoroti pentingnya pengembangan kompetensi asesmen digital dan autentik dalam mendukung paradigma baru pembelajaran berbasis proyek (Purwati & Sukirman, 2024).

Kurikulum 2013 dalam Konteks Hibridisasi Kurikulum

Kurikulum 2013 dirancang sebagai kerangka pembelajaran berbasis kompetensi yang menekankan pendekatan saintifik, integrasi mata pelajaran, serta penguatan karakter murid (Sucipto *et al.*, 2024). Salah satu keunggulan utamanya adalah keteraturan struktur Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang jelas sehingga memudahkan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan menilai capaian murid secara sistematis. Pendekatan saintifik yang meliputi observasi, pertanyaan, eksperimen, asosiasi, dan komunikasi memberikan landasan metodologis yang kuat untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan ilmiah murid. Selain itu, Kurikulum 2013 mengintegrasikan penguatan Profil Pelajar Pancasila ke dalam setiap materi ajar, sehingga tujuan pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan sikap sosial yang diharapkan dari lulusan sekolah menengah (Matondang *et al.*, 2025).

Lebih jauh, keunggulan Kurikulum 2013 terlihat pada keseragaman standar dan evaluasi antar sekolah yang memungkinkan perbandingan hasil belajar di berbagai daerah secara lebih konsisten (Pohan *et al.*, 2026). Standar nasional yang baku dalam Kurikulum 2013 membantu kepala sekolah dan pemangku kepentingan memantau pencapaian kompetensi secara transparan dan terukur. Dalam konteks hibridisasi, struktur yang sudah mapan ini menjadi landasan yang kokoh ketika sekolah perlu memastikan kelulusan murid kelas tinggi sesuai ketentuan, sambil mengadopsi elemen-elemen inovatif dari Kurikulum Merdeka untuk kelas pemula. Kurikulum 2013 berfungsi sebagai *safety net* yang mengisi kekosongan fleksibilitas dan kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka, sehingga model *hybrid curriculum model* dapat berjalan dengan keseimbangan antara standardisasi nasional dan otonomi lokal (Matondang *et al.*, 2025).

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks, yaitu praktik transisi dan perpaduan antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di sekolah menengah. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, dinamika, serta strategi yang digunakan oleh guru dan sekolah dalam merespons perubahan kebijakan pendidikan. Jenis penelitian ini bersifat studi kasus dengan fokus pada sekolah menengah yang sedang menjalani transisi kurikulum secara bertahap atau parsial. Studi kasus dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konteks, proses, dan tantangan yang dihadapi subjek penelitian secara nyata.

Penelitian ini dilakukan di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri di Jawa Barat yang sedang menerapkan kombinasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Sekolah dipilih berdasarkan sekolah terdekat dari kampus UPI yang bersedia diwawancarai terkait transisi kurikulum yang relevan dengan topik penelitian. Narasumber yang diwawancarai adalah Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Kartika XIX-2 Kota Bandung. Tahap awal dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan pertanyaan penelitian yang terarah, kemudian dilanjutkan dengan telaah pustaka untuk

memperdalam pemahaman terhadap konteks permasalahan dan mengidentifikasi celah penelitian yang belum banyak dikaji sebelumnya.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberi ruang bagi eksplorasi pemahaman dan pengalaman narasumber terkait kebijakan kurikulum. Pertanyaan yang diajukan mencakup penerapan kurikulum, tantangan yang dihadapi, pelatihan guru, evaluasi pembelajaran, serta harapan terhadap masa depan kebijakan kurikulum. Peneliti menjamin bahwa seluruh proses pengambilan data dilakukan secara etis, dengan persetujuan dari pihak sekolah dan informan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya dan hasil wawancara tidak digunakan untuk kepentingan selain penelitian. Informan diberi kebebasan untuk tidak melanjutkan wawancara jika merasa tidak nyaman.

RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan wawancara semi-terstruktur dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Kartika XIX-2, diperoleh data yang disajikan dalam **Tabel 1**.

Tabel 1. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kurikulum apa yang diterapkan di SMA Kartika XIX-2 Kota Bandung?	SMA Kartika XIX-2 Kota Bandung menerapkan dua kurikulum, yakni Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013. Kelas XII masih menggunakan Kurikulum 2013, sedangkan kelas X dan XI menerapkan kombinasi Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013. Sejak tahun 2020, ketika Kurikulum Merdeka pertama kali diresmikan dan bersifat opsional, sekolah yang siap boleh mengadopsi, sedangkan yang belum siap tetap menggunakan Kurikulum 2013.
2	Sudah berapa lama menerapkan 2 kurikulum ini dan apa pertimbangannya?	SMA Kartika XIX-2 pada saat itu belum siap secara sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, sehingga kelas XII tetap menggunakan Kurikulum 2013. Kini, angkatan XII adalah angkatan terakhir yang sepenuhnya menjalankan Kurikulum 2013; untuk angkatan XI, kami masih menerapkan Kurikulum Merdeka secara administratif, sambil terus menyesuaikan kesiapan implementasinya.
3	Apakah ada pelatihan bagi guru terkait kurikulum ini?	Untuk Kurikulum 2013, setiap guru mengikuti pelatihan melalui MGMP sehingga pemahaman antarguru relatif seragam. Sebaliknya, untuk Kurikulum Merdeka tidak ada pelatihan khusus per mata pelajaran; pelatihannya bersifat umum dan tidak diwajibkan, sehingga pemahaman tentang Kurikulum Merdeka di kalangan guru menjadi sangat beragam.
4	Apakah sekolah menggunakan tenaga ahli dari luar untuk pelatihan Kurikulum Merdeka?	Kami beberapa kali mengundang narasumber eksternal untuk memberikan pelatihan umum mengenai Kurikulum Merdeka. Namun, materi yang disampaikan masih bersifat konseptual, sehingga guru harus menafsirkan sendiri cara penerapannya di kelas, berbeda dengan pelatihan Kurikulum 2013 yang dilakukan melalui MGMP dengan panduan yang lebih terstandar.
5	Selain kendala sumber daya manusia, apakah ada hambatan lain dalam penerapan Kurikulum Merdeka?	Kendala pendanaan. Kurikulum Merdeka menuntut banyak proyek dan kegiatan kontekstual yang membutuhkan biaya, dan kami belum ingin membebani murid. Tanpa dana, sulit menemukan model proyek yang sesuai untuk berbagai mata pelajaran.
6	Bagaimana mekanisme evaluasi yang diterapkan?	Untuk Kurikulum 2013, evaluasi meliputi evaluasi formatif, sumatif, dan penilaian proses pembelajaran, dengan catatan bahwa persentase lulusan yang diterima di PTN meningkat setiap tahun. Kami belum memiliki lulusan yang sepenuhnya dibimbing oleh Kurikulum Merdeka, sehingga evaluasi autentik (portofolio atau proyek) masih dianggap terlalu umum dan belum memadai. Misalnya, murid yang kurang berinisiatif cenderung melewatkan.

No	Pertanyaan	Jawaban
7	Bagaimana mekanisme penjurusan di sekolah?	Penjurusan dilakukan berdasarkan minat murid; contohnya, murid yang memilih Teknik Sipil atau Teknik Logistik akan mengikuti mata pelajaran khusus yang terkait dengan jurusan tersebut. Kami masih menghadapi kesulitan akibat keterbatasan jumlah guru di setiap bidang keahlian.
8	Apa harapan Ibu terhadap pengembangan kurikulum ke depan?	Diharapkan perubahan kurikulum tidak terlalu sering dan selalu mempertimbangkan kondisi di lapangan. Jangan sampai kebijakan berubah mendadak tanpa disesuaikan dengan kesiapan sumber daya dan sarana prasarana di sekolah.

Sumber: Penelitian 2025

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa sekolah mengadopsi pendekatan *hybrid curriculum model* dalam penerapan kurikulum. Pada jenjang kelas X dan XI, Kurikulum Merdeka menjadi inovasi utama yang memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran, sedangkan untuk murid kelas XII, Kurikulum 2013 dipertahankan sebagai langkah antisipasi untuk persiapan ujian akhir. Hasil wawancara mengungkap 2 hambatan utama. Pertama, terkait sumber daya manusia, beberapa guru belum memperoleh pelatihan mendalam mengenai filosofi dan metodologi Kurikulum Merdeka, sementara tenaga ahli pendukung masih terbatas. Kedua, pada aspek infrastruktur dan pendanaan, fasilitas seperti perangkat proyektor dan tablet belum tersedia secara merata, serta anggaran sekolah belum memiliki pos khusus untuk mendukung inovasi kurikulum tersebut. Temuan ini menegaskan perlunya program pelatihan berjenjang bagi guru serta alokasi dana yang lebih terarah agar model *hybrid curriculum model* dapat berjalan dengan baik (Widiansyah *et al.*, 2025).



Gambar 1. Ruang tata usaha SMA Kartika sebagai salah satu fasilitas penunjang administrasi kurikulum sekolah
Sumber: Dokumentasi Penulis 2025

Gambar 1 menunjukkan ruang tata usaha di SMA Kartika XIX-2 yang berperan sebagai pusat pengelolaan administrasi sekolah, termasuk dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 secara *hybrid*. Fasilitas ini menjadi bagian penting dalam koordinasi dokumen, perencanaan kurikulum, dan komunikasi antar pemangku kepentingan di sekolah.

Model *Hybrid* dan Perencanaan Kolaboratif

Strategi *hybrid* yang memadukan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka diimplementasikan melalui perencanaan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pentingnya pembentukan tim pendamping internal di tingkat sekolah, yang terdiri atas guru berpengalaman, koordinator kurikulum, dan tenaga ahli dari dinas pendidikan, yang secara rutin merancang, memantau, dan mengevaluasi modul-modul Merdeka (Kurniawan *et al.*, 2024). Selain itu, integrasi Kurikulum 2013 pada kelas akhir difungsikan sebagai “*safety net*” untuk menjamin capaian standar kelulusan nasional, sekaligus memitigasi risiko

perubahan mendadak (Pohan *et al.*, 2026). *Hybrid curriculum model* bukan sekadar menumpuk dua kurikulum, tetapi menggabungkan keunggulan masing-masing melalui koordinasi intensif, dialog berkala, dan penyesuaian berbasis bukti di lapangan, demi kelancaran transisi dan keberlanjutan pembelajaran.

Implementasi Kurikulum Merdeka mendorong keterlibatan aktif murid melalui diskusi dan tanya jawab sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan partisipasi murid dalam proses pembelajaran, sedangkan Kurikulum 2013 cenderung lebih terstruktur dan berorientasi pada pencapaian akademik sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang berbeda bagi murid (Ramadani *et al.*, 2025). Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek filosofi pendidikan dalam perencanaan transisi kurikulum. Pandangan idealisme Ki Hajar Dewantara yang menekankan pembentukan karakter dan kemandirian murid menjadi fondasi penting dalam Kurikulum Merdeka (Salmiyanti & Desyandri, 2023). Pendekatan ini mendukung narasi bahwa perencanaan kolaboratif bukan sekadar administratif, tetapi juga pedagogis.

Kendala Pelatihan dan Sumber Daya

Pelaksanaan *hybrid curriculum model* di SMA Kartika XIX-2 menemui kendala serius berupa minimnya pelatihan bagi guru serta kekurangan tenaga ahli yang memahami esensi Kurikulum Merdeka. Kesenjangan antara desain kebijakan dan kesiapan di lapangan masih signifikan, terutama terkait metodologi pembelajaran aktif, penilaian autentik, dan pemanfaatan teknologi pendidikan. Akibatnya, banyak guru yang mengandalkan perangkat ajar lama sehingga inovasi kurikulum belum berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang meneliti implementasi Kurikulum Merdeka di MA Amanatul Ummah Surabaya, yang membuktikan bahwa sebagian guru mengalami kesulitan beradaptasi dengan Kurikulum Merdeka karena paradigma pembelajarannya berbeda dari kurikulum sebelumnya, terutama dalam aspek fleksibilitas, diferensiasi, dan pembelajaran berbasis proyek, yang dipengaruhi oleh keterbatasan pelatihan, kurangnya sosialisasi, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya pendukung yang belum memadai (Rohman & Aula, 2025).

Dalam menanggapi hal ini, sekolah perlu merancang *roadmap* pelatihan berkelanjutan yang mencakup *workshop*, bimbingan teknis, dan komunitas praktik, serta membentuk tim pendamping internal yang secara aplikatif mengawal implementasi di setiap jenjang kelas. Kolaborasi melalui forum diskusi antar guru dapat menjadi sarana yang efektif untuk berbagi pengalaman, mengatasi kendala, dan menemukan solusi dalam implementasi Kurikulum Merdeka (Rohman & Aula, 2025). *Capacity building* semacam ini penting untuk membangun kompetensi profesional guru agar mampu mengadopsi paradigma pembelajaran merdeka dengan percaya diri dan konsisten. Penting pula untuk mengaitkan kebutuhan pelatihan dengan dimensi otonomi profesional guru. Studi terdahulu menegaskan bahwa tingkat motivasi dan otonomi guru sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum baru. Tanpa kepercayaan dan ruang inovasi, pelatihan hanya menjadi rutinitas tanpa perubahan dalam praktik (Yildiz *et al.*, 2021). Oleh karena itu, pelatihan harus memperkuat kompetensi reflektif dan adaptif guru dalam konteks pembelajaran yang dinamis.

Evaluasi Kurikulum dan Autentik

Karena lulusan SMA Kartika XIX-2 belum sepenuhnya menerapkan Kurikulum Merdeka, mekanisme evaluasi yang ada masih terbatas dan bergantung pada instrumen Kurikulum 2013, termasuk formatif dan sumatif berbasis tes tertulis serta portofolio sederhana. Padahal, penilaian autentik berbasis proyek lebih mencerminkan kompetensi abad ke-21, seperti kolaborasi, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah (Bahja *et al.*, 2025). Penerapan asesmen formatif berbasis digital dan kegiatan refleksi diri murid masih terbatas, sehingga proses transformasi menuju kurikulum yang lebih adaptif masih berlangsung (Sefrinal *et al.*, 2025).

Oleh karena itu, pengembangan kerangka penilaian autentik yang terstruktur menjadi kebutuhan mendesak: dimulai dari penetapan rubrik kinerja, panduan penilaian diri dan antar teman, hingga

mekanisme umpan balik formatif yang berkelanjutan. Implementasi penilaian semacam ini menuntut pelatihan bagi guru dalam merancang tugas otentik, mengelola portofolio digital, dan memfasilitasi diskusi reflektif murid, sehingga evaluasi tidak lagi berorientasi pada pengukuran hafalan, melainkan pada pengembangan karakter dan keterampilan yang nyata. Lebih lanjut, evaluasi autentik memerlukan inovasi dalam penggunaan teknologi serta integrasi alat asesmen digital. Sejalan dengan temuan studi terdahulu yang menyatakan bahwa kemampuan guru dalam menggunakan instrumen evaluasi digital merupakan faktor kunci keberhasilan asesmen Kurikulum Merdeka. Hal ini penting untuk membangun sistem evaluasi yang berdaya guna, fleksibel, dan sesuai dengan karakteristik generasi digital-native (Purwati & Sukirman, 2024).

Kontribusi dan Implikasi Praktis

Studi kasus di SMA Kartika XIX-2 memperlihatkan bahwa *hybrid curriculum model* tidak hanya sebatas kombinasi dua kurikulum, melainkan sebuah proses transformasi yang memerlukan adaptasi konteks dan sinergi pemangku kepentingan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa penerapan strategi transisi yang fleksibel, misalnya mengadopsi Kurikulum Merdeka untuk kelas X dan XI, lalu mempertahankan Kurikulum 2013 untuk kelas XII, memungkinkan penyesuaian beban pembelajaran sesuai dengan tingkat kedewasaan akademik murid. Selain itu, kebijakan kontekstual yang mempertimbangkan profil sumber daya lokal, seperti fasilitas laboratorium, akses teknologi, dan latar belakang sosial ekonomi murid, terbukti meningkatkan relevansi modul ajar. *Capacity building* melalui pelatihan internal dan kolaborasi eksternal (dengan perguruan tinggi atau praktisi industri) memperkuat kompetensi guru dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran merdeka. *Hybrid curriculum model* di SMA Kartika XIX-2 berpotensi menjadi contoh *best practice* yang substantif.

Bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan reformasi pendidikan yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid. Penyesuaian ini mencerminkan pentingnya pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap konteks sosial budaya serta dinamika pendidikan global. Seperti dikemukakan dalam penelitian sebelumnya, inovasi kurikulum yang kontekstual harus disertai strategi pendampingan berkelanjutan agar dapat bertransformasi menjadi kebijakan yang berdampak jangka panjang (Ulum & Mun'im, 2023). Keberhasilan pengembangan kurikulum ditentukan oleh ketepatan analisis kebutuhan sehingga layanan pendidikan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan murid secara optimal (Nursaputri & Aisyah, 2024). Keberhasilan implementasi kurikulum memerlukan dukungan berupa pelatihan berkelanjutan, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta sistem evaluasi yang konsisten. Integrasi keunggulan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka berpotensi menjadi pendekatan yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan (Tarbiyah et al., 2025).

CONCLUSION

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap implementasi kurikulum di SMA Kartika XIX-2 Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa proses transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka di sekolah ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Sekolah memilih menerapkan perpaduan antara dua kurikulum, di mana kelas X dan XI mengikuti Kurikulum Merdeka, sedangkan kelas XII tetap menggunakan Kurikulum 2013. Keputusan ini diambil karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan yang memadai, serta perubahan kurikulum yang masih bersifat opsional dan belum sepenuhnya wajib. Dualisme kurikulum ini menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam hal keseragaman perencanaan dan evaluasi pembelajaran antar tingkat kelas.

Kendala utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka terletak pada kesiapan guru dan infrastruktur sekolah. Tidak semua guru mendapatkan pelatihan formal dari institusi, dan pelatihan dari luar pun masih sangat terbatas pada mata pelajaran tertentu. Di sisi lain, penerapan Kurikulum Merdeka yang sangat

menekankan inisiatif murid menjadi tantangan karena tidak semua murid memiliki motivasi belajar mandiri yang cukup kuat. Akibatnya, terdapat kecenderungan murid menjadi pasif dalam proses pembelajaran. Dari sisi evaluasi, sekolah masih menggunakan pendekatan evaluasi seperti pada Kurikulum 2013 yang mencakup evaluasi formatif, sumatif, dan penilaian pembelajaran. Namun, untuk Kurikulum Merdeka, evaluasi belum sepenuhnya berjalan karena belum ada satu pun angkatan yang lulus dengan kurikulum tersebut.

Secara pribadi, pihak kurikulum sekolah berharap kebijakan kurikulum tidak terlalu sering berubah, dan apabila ada perubahan, sebaiknya mempertimbangkan kondisi dan tantangan nyata di lapangan, khususnya terkait kesiapan guru, fasilitas, serta keberagaman kondisi sekolah. Transisi kurikulum dapat berjalan lebih realistis dan lebih kontekstual. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan agar pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih serius dalam menyediakan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi guru di semua mata pelajaran, guna memperkuat implementasi Kurikulum Merdeka. Sekolah perlu menyusun strategi transisi yang lebih terarah dan mendukung murid untuk menjadi pembelajar mandiri secara aktif. Selain itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan studi ke beberapa sekolah lain agar diperoleh gambaran yang lebih representatif tentang praktik transisi kurikulum di berbagai wilayah dan konteks kelembagaan.

AUTHOR'S NOTE

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dan menjamin bahwa seluruh isi artikel ini bebas dari plagiarisme.

REFERENCES

- Bahja, A. W. T., Hakim, L., & Afidah, A. (2025). Literature review: Analisis model pembelajaran efektif dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah. *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 17(1), 11-16.
- Chand, S. P. (2024). Constructivism in education: Exploring the contributions of Piaget, Vygotsky, and Bruner. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 12(7), 274-278.
- Damayanti, A. T., Pradana, B. E., Putri, B. P., & Laila, H. N. (2023). Literature review: Problematika kesiapan guru terhadap penerapan Kurikulum Merdeka. *Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian*, 5(1), 465-471.
- Darwin, D., Boeriswati, E., & Murtadho, F. (2023). Asesmen pembelajaran bahasa dalam Kurikulum Merdeka Belajar pada siswa SMA. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 12(2), 25-36.
- Fadhilah, I., An-Nafi'i, I. M., & Ngadimah, M. (2025). Perbandingan kurikulum di Indonesia: Kurikulum 2013 (K13) dengan Kurikulum Merdeka. *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(3), 141-167.
- Kurniawan, B., Rahmawati, F. P., & Ghufro, A. (2024). Dinamika penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar: Tinjauan literatur sistematis. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(3), 1672-1678.
- Laia, P. I. S., Hutagalung, Y. M., Hulu, N. O. S., Panggabean, W., Purba, K., & Lase, I. (2025). Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka dalam strategi pendidikan. *Journal Education, Sociology and Law*, 1(1), 403-418.
- Matondang, T. S., Boangmanalu, L. K., Purba, H. N., Zaki, A., Siregar, B., & Wasiyem. (2025). Kepemimpinan inovatif kepala sekolah dalam menghadapi tantangan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 846-853.
- Muhammad, R. R., Lawson, D., Aslam, F., & Crawford, M. (2023). Indonesian Curriculum 2013 ten years on: Impact on mathematics teaching. *Journal of Research in Science, Mathematics and Technology Education*, 6(SI), 109-136.
- Muzaky, F., & Achadi, M. W. (2024). Policy analysis of the 2013 curriculum: Impacts and challenges for teachers in the learning process at senior high schools. *International Journal of Post Axial: Futuristic Teaching and Learning*, 2(4), 259-273.

- Nursaputri, E. R., & Aisyah, S. (2024). Exploring the benefits of curriculum development for students. *Abjadia: International Journal of Education*, 9(1), 57-71.
- Oktavia, R., Mirza, A. A., & Qamariah, Z. (2023). The history of curriculum in Indonesia: a literature study. *Pustaka: Jurnal Bahasa dan Pendidikan*, 3(4), 105-117.
- Paramita, E., Aminullah, A., Ratnasari, D., & Husna, A. (2025). Transformasi perkembangan kurikulum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(1), 169-184.
- Pohan, S., Melandamayanti, M., Zaman, I. K., & Nihaya, W. (2026). Perbandingan kebijakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka: dampak terhadap kualitas pendidikan. *Lokakarya*, 5(1), 114-120.
- Puad, L. M. A. Z., & Ashton, K. (2023). A critical analysis of Indonesia's 2013 national curriculum: Tensions between global and local concerns. *The Curriculum Journal*, 34(3), 521-535.
- Purwati, E., & Sukirman, D. (2024). Teacher competence development in Kurikulum Merdeka implementation: A literature study. *Inovasi Kurikulum*, 21(1), 41-54.
- Puspita, Y., & Atikah, C. (2023). Analisis perubahan kebijakan pendidikan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pengelolaan Pendidikan JUNI*, 4(1), 9-21.
- Ramadani, N., Audina, I., & Nasution, A. (2025). Strategi Pembelajaran: Sistem Pendidikan Kurikulum Merdeka di Sekolah MAN 2 Lubuk Pakam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(1), 53-64.
- Rohman, F., & Aula, R. (2025). Inovasi dalam problematika implementasi Kurikulum Merdeka di MA Amanatul Ummah Surabaya melalui integrasi madrasah akademik dan sistem Daw Long. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 12(1), 468-481.
- Saa, S. (2024). Merdeka curriculum: Adaptation of Indonesian education policy in the digital era and global challenges. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(3), 1-24.
- Salmiyanti, S., & Desyandri, D. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam pandangan filsafat idealisme. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1371-1375.
- Salsabilah, N., Anggraini, T. A., Ananda, M. L., Sabina, R., & Annur, S. (2024). Analisis kesulitan guru dalam mentransformasikan Kurikulum K13 menuju Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(2), 1368-1380.
- Sefrinal, Rizal, F., Ambiyar, Handayani, R., & Sari, F. A. (2025). Rekonstruksi kurikulum SMAN 2 Sutera: Dari evaluasi dokumen dan implementasi ke model kurikulum ideal di era digital. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 10(3), 1402-1409.
- Sucipto, S., Sukri, M., Patras, Y. E., & Novita, L. (2024). Tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar: Systematic literature review. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 12(1), 278-281.
- Sya'roni, S., Jalil, A., Juanda, A., & Suklani, S. (2025). Merancang pengembangan kurikulum adaptif di era disrupsi: Strategi transformasional untuk pendidikan abad-21. *Edum Journal*, 8(2), 13-26.
- Tampubolon, R., Gulo, Y., & Nababan, R. (2022). Pengaruh reformasi kurikulum pendidikan Indonesia terhadap kualitas pembelajaran. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 389-395.
- Tarbiyah, S., Mahfudza, F. Z., Putri, N. A., Ningrum, D. K., & Nabillah, Y. T. (2025). Analyzing the implementation of K13 and Kurikulum Merdeka: Students' perceptions. *Curricula: Journal of Curriculum Development*, 4(1), 255-272.
- Ulum, M., & Mun'im, A. (2023). Curriculum development, guidance, and innovation in schools. *Journal of Islamic Education*, 1(1), 50-60.
- Wibowo, S., Wangid, M. N., & Firdaus, F. M. (2025). The relevance of Vygotsky's constructivism learning theory with differentiated learning in primary schools. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 19(1), 431-440.
- Widiansyah, S., Hidayat, S. P., Kamil, S. I., Purba, I. D. L. B., Rahmawati, U., & Khairo, F. M. A. (2025). Kesiapan guru dalam menghadapi tantangan implementasi Kurikulum Merdeka: (studi kasus di sekolah menengah atas). *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 334-352.
- Wulandari, R. (2021). Characteristics and learning models of the 21st century. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series*, 4(3), 8-16.
- Yildiz, B. B., Gunay, G., & Özbilen, F. M. (2021). Evaluation of teachers' motivation and curriculum autonomy levels. *Educational Policy Analysis and Strategic Research*, 16(2), 330-353.